

Judul : DPR Dukung hibah motor listrik BGN untuk guru honorer
Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

DPR Dukung Hibah Motor Listrik BGN Untuk Guru Honorer



Yahya Zaini

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik kepada para guru honorer di berbagai daerah. Langkah tersebut merupakan solusi yang paling tepat agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tidak mubazir dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Waktu rapat dengan Komisi IX DPR, Ibu Arumsari (Wakil Kepala BGN) mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru honorer di daerah-daerah. Saya setuju dengan rencana tersebut," kata Yahya, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, motor listrik yang dibeli pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana akan dihibahkan ke guru honorer. Kendati begitu, BGN tetap akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait langkah hukum dan administrasi yang akan ditempuh.

"Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, seperti motor listrik dan Information Technology (IT) sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan," ujar Agustina, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina mengatakan, evaluasi ketat tidak hanya dilakukan terhadap komoditas motor listrik, tapi mencakup seluruh barang dan perangkat teknologi informasi yang dibeli pada tahun 2025. Seperti laptop, Internet of Things (IoT), hingga kamera CCTV.

Kembali ke pernyataan Yahya, sejak awal ia tidak sepakat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Alasannya,

kendaraan tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan nyata para pengelola dapur dalam menjalankan tugasnya di lapangan. "Mereka tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja," imbuh politisi Golkar ini.

Komisi IX DPR, sebut Yahya, tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu membuat fungsi pengawasan DPR terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, ia menyoroti proses pengadaan yang dinilai tidak profesional karena perusahaan penyedia kendaraan tidak memiliki jaringan dealer maupun fasilitas layanan purna jual yang memadai. Karena itu, adanya indikasi penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan tersebut sangat disesalkan.

"Tapi kami tetap mengapresiasi pandangan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari yang berkomitmen menyelamatkan uang negara lewat optimalisasi aset yang telanjur dibeli," puji legislator asal Jawa Timur (Jatim) ini.

Berbeda, anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengusulkan agar motor listrik tersebut dijual kembali apabila tidak dibutuhkan. Keberadaan motor listrik tidak efektif karena mayoritas kepala SPPG telah memiliki kendaraan operasional sendiri.

"Motor listrik dimanfaatkan untuk apa? Mubazir saja, lebih baik dijual lagi saja, karena rata-rata kepala SPPG punya motor," kata Irma, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain itu, Irma meminta pimpinan BGN yang baru menata ulang skema insentif bagi SPPG. Besaran insentif perlu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur MBG. "Yang distribusi 3 ribu dengan yang distribusi 2.500 atau 2 ribu memang harus beda," saran dia.

Ke depan, Irma berharap agar program MBG lebih tepat sasaran dengan memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu. Sedangkan siswa yang berasal dari sekolah elite tidak perlu menjadi penerima manfaat program tersebut. ■ TIF